

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan pemerintah merupakan komponen penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan kepada publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen pada instansi pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus disajikan berdasarkan SPI dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, komponen pokok LKPD sebagai entitas pelaporan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca, Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO), Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintahan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagai usaha nyata pemerintah dalam upaya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan dengan mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat, agar dijadikan acuan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Keandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi disajikan dengan keadaan atau peristiwa yang wajar dan sesuai dengan yang sebenarnya.

Menurut Suwardjono (2005), Keandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Dalam hal tertentu, mengejar keberpautan dan ketepatanwaktuan untuk mencapai kebermanfaatan harus dibarengi dengan mengorbankan kualitas lain yaitu keakuratan / presisi (*accuracy /precision*) atau keandalan. terdapat saling korban (*trade-off*) antara ketepatanwaktuan dan keandalan/ reliabilitas untuk mendapatkan kebermanfaatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Suatu informasi dapat dikatakan andal apabila:

1. Bisa diuji kebenarannya, dengan metode yang sama dapat menghasilkan hasil akhir yang sama;
2. Netral, tidak berunsur biasa dan informasi diarahkan untuk kebutuhan umum dan tidak cenderung kepada pihak tertentu;

3. Penyajian secara wajar atau jujur dengan menyajikan keadaan secara lengkap dan wajar antara data akuntansi dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Informasi dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan disajikan sesuai dengan batas pemahaman para pengguna.

Menurut berita yang diunggah oleh antaranewss.com pada 15 april 2022 bahwa badan pemeriksa keuangan (BPK) menemukan tiga permasalahan dalam laporan keuangan (LK) Pemerintah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2022 yang pertama pemerintah aceh belum memutakhirkan regulasi pendapatan pajak air permukaan yang menyebabkan pemerintah aceh belum dapat merealisasikan penerimaan pajak air permukaan secara optimal, Kedua klasifikasi penganggaran dan realisasi belanja pada tujuh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) aceh tidak tepat dan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. dan yang ketiga adalah permasalahan kekurangan volume atas 18 paket kegiatan belanja modal, permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 12,22 miliar. Maka dari itu, kendala dari itu pelaporan keuangan sangat penting untuk menunjukkan secara nyata tanggung jawab pemerintah daerah atas wewenang yang dilimpahkan dalam mengelola organisasi.

Salah satu faktor yang berdampak pada keandalan pelaporan keuangan adalah Sumber Daya Manusia (SDM). SDM adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi disebut juga personil, tenaga kerja, pegawai dan karyawan. Unsur manusia yang dilihat dari potensinya disebut sumber daya, berbeda dengan sumber daya material. Manusia sebagai sumber daya yang

bersifat potensial/abstrak tidak dapat diukur dari jumlahnya. Potensi ini merupakan proses dan hasil interaksi substansi fisik dan psikis berupa kemampuan menciptakan, kemampuan berfikir yang menghasilkan gagasan, kreativitas, inisiatif, kemampuan memecahkan masalah, memprediksi, wawasan ke masa depan, keterampilan dan Remunerasi. Dalam sektor publik, manajemen SDM berusaha untuk mengungkapkan manusia sebagai sumber daya seutuhnya dalam konsepsi pembangunan bangsa yang utuh dan menyeluruh. Dalam lingkup instansi pemerintah pun, pegawai atau SDM aparatur yang selanjutnya disebut sebagai Aparatur Sipil Negara memiliki peran penting dalam birokrasi sebagai pelaksanaan utama tugas pemerintah (Furqan, 2016).

Kualitas sumber daya manusia adalah sumber daya yang memiliki kompetensi baik dari aspek fisik maupun aspek intelektual. Mereka yang kompeten tentunya dapat mengelola usahanya dengan baik. Dengan itu usaha yang dijalankan akan lebih berkembang. Kinerja suatu organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berada di dalamnya. Apabila sumber daya manusianya memiliki motivasi tinggi, kreatif dan mampu mengembangkan inovasi, kinerjanya akan menjadi semakin baik. Oleh karenanya diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (Basuki, 2015).

Menurut penelitian yang dilakukan (Dito Aditia Darma Nasution, 2019) Berdasarkan hasil pengujian secara parsial maka kualitas Sumberdaya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan (Rizki Agus Putra, 2017) Hasil pengujian

hipotesis menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya hipotesis dalam penelitian ini diterima. Menurut penelitian yang dilakukan (Aditya Akbar Putra Pradana, 2018) Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dari nilai t hitung (2,567) lebih besar dari pada t tabel (1,993) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi 0,012.

Laporan keuangan yang dapat dipercaya akan menciptakan good governance yang baik pula, yang kemudian diperlukan adanya campur tangan dari bagian pengawasan keuangan daerah. Pengawasan itu sendiri merupakan usaha yang sistematis untuk menerapkan kinerja standar pada perencanaan, merancang sistem feedback informasi, membandingkan antara kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, dan menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta mengambil kebijakan perbaikan yang dibutuhkan dalam upaya penjaminan agar sumber data pemerintahan atau organisasi tersebut telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan pemerintah atau organisasi (Azlan, dkk. 2015).

Tugas pengawasan pada dasarnya bukan hanya menjadi tugas untuk bagian pengawasan, tetapi seharusnya dilaksanakan oleh seluruh aparatur pemerintahan pada semua elemen. Langkah yang dapat diterapkan dalam menunjang pengawasan yang lebih efektif diantaranya adalah melakukan organisir ulang, memperbaiki sistem yang dijalankan, membuat pedoman baru yang lebih sesuai dengan keadaan terkini dan sebagainya (Kombong, 2017)

Pengawasan Keuangan Daerah merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pengertiannya, pengawasan keuangan daerah pada dasarnya mencakup segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan dan Undang-Undang yang berlaku (Baswir, 2008).

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, bila terjadi hambatan diharapkan akan segera dideteksi atau di ambil Tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan dengan lancar.

Menurut penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh (Rizki Agus Putra ,2017) Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpegaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya hipotesis dalam penelitian ini diterima. menurut penelitian yang dilakukan oleh (Gita Silvia Marda,2017) Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan. artinya hipotesis dalam penelitian ini diterima. menurut penelitian yang dilakukan oleh (Iskharimah,2021) Pengawasan Keuangan memiliki nilai koefisien sebesar $-0,251$. Yang artinya pengawasan keuangan berpengaruh terhadap keandalaan laporan keuangan. Pengaruh yang negatif ini menunjukkan bahwa apabila pengawasan keuangan ditingkatkan 1 satuan maka mampu menurunkan keandalaan laporan keuangan sebesar $-0,251$ satuan.

Komitmen manajemen dalam hal ini terkait dengan integritas manajemen dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang andal dan relevan untuk pengambilan keputusan. Integritas dan kepatuhan atas hukum akan terwujud apabila diikuti dengan komitmen yang kuat di dalam organisasi (Ridha, 2012).

Dalam jangka panjang keterandalan pelaporan keuangan membutuhkan komitmen dari manajemen (SKPD) untuk terus belajar guna memahami dan menyesuaikan praktiknya dengan peraturan yang baru. Sehingga perlu ditingkatkan komitmen yang lebih baik, guna meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan dalam pelaporan keuangan menjadi andal..

Dari pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Komitmen manajemen merupakan salah satu hal penting yang perlu diterapkan dalam pemerintah agar menghasilkan laporan keuangan yang andal. Dengan adanya suatu komitmen, organisasi maka akan berkembang seiring sejalan dalam usaha mewujudkan program organisasi. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa komitmen manajemen akan mengandung unsur loyalitas terhadap organisasi dalam kinerja pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rizki Agus Putra, 2017) Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Komitmen Manajemen berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya hipotesis dalam penelitian ini diterima.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan serta adanya ketidaksesuaian hasil yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang berbeda mengenai keandalan pelaporan keuangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ulang yang

lebih dalam di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Aceh timur. Namun dalam penelitian ini mempunyai keterbatasan dimana hanya mengambil tiga variabel sebagai pembahasan penelitian, yaitu sumber daya manusia, pengawasan keuangan pemerintah dan komitmen manajemen dikarenakan variabel tersebut dirasa sangat penting sebagai komponen dari nilai perusahaan. sehingga peneliti mengambil judul

“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Pemerintah dan Komitmen Manajemen Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Timur “.

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Timur ?
2. Apakah pengawasan keuangan pemerintah berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Timur ?
3. Apakah komitmen manajemen berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Timur?

4. Apakah kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan pemerintah dan komitmen manajemen berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten aceh timur
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan keuangan pemerintah terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten aceh timur
3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen manajemen terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten aceh timur
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan pemerintah dan komitmen manajemen terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten aceh timur

1.4 Manfaat Penelitian

Sehubung dengan Penelitian di atas, penelitian ini bermanfaat, yakni;

1.4.1. Manfaat Akademik

Dapat dijadikan tambahan pengetahuan serta bahan rujukan bagi penelitian yang akan datang yang mengangkat penelitian yang sama dan sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai penelitian terkait.

1.4.2. Manfaat Non Akademik

Bagi pemerintah daerah kabupaten Aceh Timur dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan kebijakan daerah khususnya tentang kualitas sumber daya manusia, pengawasan keuangan daerah dan komitmen manajemen terhadap keandalan pelaporan keuangan agar dapat menjadi suatu pahaman bagi pembaca dan memberikan suatu ilmu yang bermanfaat bagi pembaca.